

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Di Pemerintah Kota Palembang)



**Diajukan Oleh :
WAHYU ROSANANTO
NIM. 01013130031**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

658.157107
Ros
d
2008

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**



16174
16536

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Di Pemerintah Kota Palembang)



Diajukan Oleh :
WAHYU ROSANANTO
NIM. 01013130031

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WAHYU ROSANANTO
NIM : 01013130031
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

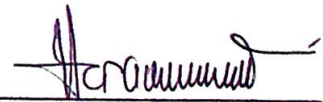
PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 25-02-2008.....

Ketua



Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak

Tanggal 22-02-2008.....

Anggota



H. Aspahani, SE, MM, Ak

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : WAHYU ROSANANTO
NIM : 01013130031
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 15 Februari 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya 25 Februari 2008

Ketua

Anggota

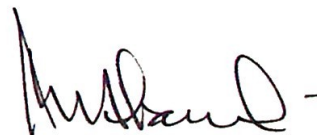
Anggota



Drs Harun DL M.Si, Ak
NIP : 131885907



Sulaiman S.M, SE, MBA, Ak
NIP : 132000094



Drs Burhanudin, M.Acc, Ak
NIP : 131801649

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak.
NIP : 132000097

MOTTO :

Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kesusahannya, selalu introspeksi diri, bisa mempersiapkan bekal untuk matinya, dan selalu merasa diawasi Allah, baik ketika terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi."

Dengan Rahmat –Mu karya Ini

Ku Persembahkan Kepada

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Sahabat Dan Almamater

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkah, rahmat dan hidayah Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.

Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah kota Palembang)**

Studi ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian pemerintah kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan pemerintah kota Palembang Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kota Palembang yang ditinjau dari segi kemandirian keuangan, desentralisasi fiskal. Efisiensi dan efektivitas PAD dan rasio keserasian antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja di pemerintah kota Palembang

Penulis berharap sekiranya skripsi ini bermanfaat bagi penggunanya baik itu rekan mahasiswa dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah kota Palembang dikemudian hari

Penulis

Wahyu R

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berjudul **“Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis kinerja Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah”** yang merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof, Dr, Hj. Badia Perizade MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. H. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan seluruh staf yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi akademik.
3. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada penulis selama studi.
4. Bapak Drs Tertiarto Wahyudi, MAFIS, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Drs. Harun Delamat, M.Si, Ak selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak H. Aspahani SE, MM, Ak selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Sulaiman Surya Manggala, SE, MBA, Ak selaku dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah menguji dan memberikan masukan dan pengarahan yang berguna bagi penulis.
8. Bapak Drs Burhanudin, M.Acc, Ak selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah menguji dan memberikan masukan dan pengarahan yang berguna bagi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bimbingan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya .
11. Keluargaku yang tercinta, yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Akuntansi '01 **Yadi' Koko Anton, Andre, Akmal Pa'e, Ustadz Daus, Komar The Living Legend, Dian, Yunus,** dan seluruh Ak 01 yang sudah duluan
13. Untuk Komunitas Pengar.com & CM Club Admien, Andi, Ridwan Rendi dll

14. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Akuntansi. Amin

Penulis

Wahyu R

DAFTAR ISI

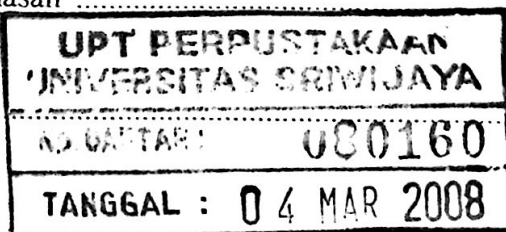
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAKSI	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Rancangan Penelitian	5
1.5.2 Lokasi dan waktu penelitian	6
1.5.3 Operasionalisasi variabel	6
1.5.4 Batasan Penelitian	7
1.5.5 Jenis Data	7
1.5.6 Sumber Data	8
1.5.7 Metode Pengumpulan Data	9
1.5.8 Metode analisis data	10
1.6 Sistematika Pembahasan	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran	7
--------------------	---



2.1.1	Pengertian anggaran	17
2.1.2	Fungsi Dan Jenis Anggaran	18
2.1.3	Siklus Anggaran	22
2.2	Anggaran kinerja	23
2.2.1	Pengertian Anggaran kinerja.....	23
2.2.2	Karakteristik Anggaran Kinerja	25
2.2.3	Kelebihan Dan Kekurangan Anggaran Kinerja.....	25
2.2.4	Proses Anggaran Berbasis Kinerja.....	27
2.2.4.1	Tahap Penyusunan Anggaran kinerja	27
2.2.4.2	Pelaporan dan Evaluasi Anggaran.....	31
2.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31
2.3.1	Pengertian APBD	31
2.3.2	Struktur APBD	33
2.3.3	Perubahan Struktur APBD	34
2.3.4	Proses Penyusunan APBD.....	35
2.4	Keuangan Daerah	39
2.4.1	Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah ...	39
2.4.2	Azaz umum pengelolaan keuangan daerah	40
2.4.3	Regulasi dan Standar di sektor publik	42
2.5	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	44
2.5.1	Pengertian Kinerja Keuangan	44
2.5.2	Tujuan dan manfaat sistem pengukuran kinerja.....	45
2.5.3	Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja	47
2.5.4	Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	47
2.6	Penelitian terdahulu	52
2.7	Perumusan Hipotesis.....	54

BAB III : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

3.1	Profil Wilayah	57
3.2	Penduduk.....	59
3.3	Perekonomian	60
3.4	Keuangan Daerah	62
3.5	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.....	63

3.6 Struktur Pemerintahan	67
BAB IV : PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi hasil penelitian	68
4.2 Pengujian Hipotesis	80
4.3 Pembahasan.....	84
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
2.1 Perhitungan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan	33
3.1 Luas Wilayah Kota Palembang	58
3.2 Luas Wilayah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk	60
3.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006	62
4.1 Rasio PAD Terhadap Pengeluaran Daerah	69
4.2 Rasio PAD Terhadap Pengeluaran Rutin	70
4.3 Rasio Penerimaan Yang Berasal Dari Daerah Terhadap Pengeluaran Daerah	69
4.4 Rasio PAD Terhadap Penerimaan Daerah	71
4.5 Rasio BHPBP Terhadap Penerimaan Daerah.....	73
4.6 Rasio Sumbangan Dari Pusat Terhadap Penerimaan Daerah	74
4.7 Rasio Belanja Rutin / Aparatur Daerah.....	75
4.8 Rasio Belanja Pembangunan / Pelayanan Publik.....	76
4.9 Rasio Efisiensi.....	78
4.10 Skala Interval Efisiensi.....	75
4.11 Rasio Efektivitas.....	79
4.12 Skala Interval Efektivitas	79
4.13 Rasio Kemandirian.....	81
4.14 Rasio Desentralisasi Fiskal.....	82
4.15 Rasio Keserasian	83
4.16 Rasio Efisiensi Dan Efektivitas	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1 Struktur pemerintahan pemerintah kota Palembang	67

**Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi kasus Di Pemerintah kota Palembang)**

Di Susun Oleh :

Wahyu R

ABSTRAKSI

Dengan terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian serta efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Untuk itu melalui reformasi anggaran yaitu pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada keputusan menteri dalam negeri No 29 / 2002 yang kemudian direvisi dengan mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan terjadi perubahan dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah

Studi ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian pemerintah kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan pemerintah kota Palembang yang ditinjau dari segi kemandirian keuangan, desentralisasi fiskal, rasio efisiensi dan efektivitas PAD dan rasio keserasian pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja

Hipotesis diuji dengan uji beda non parametrik yaitu uji peringkat bertanda wilcoxon (wilcoxon sign rank test). Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kota Palembang yang ditinjau dari segi kemandirian keuangan, desentralisasi fiskal. Efisiensi dan efektivitas PAD dan rasio keserasian antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja di pemerintah kota Palembang

Kata Kunci : Anggaran Berbasis kinerja, Kinerja Keuangan, Pemerintah Kota Palembang

**Analysis Influence of Application Performance Based Budgeting
to Financial Performance of Local Government
(Case study in local government of Palembang)**

Written By :

Wahyu R

ABSTRACT

By holding the regional autonomy in Indonesia since 2001 it is hope can promote the general welfare of the people, give the good service to the public create a democratic life dan justice with openness and desentralization also efficiency and effectiveness of financial resource to all of the government element. Through the budget reform , which obtain the performance based budgeting that based on the minister of internal affairs rules No 29 / 2002 and the revised the minister of internal affairs rules no 13 about the region management guideline 2006 hope there is a change in financial arrangement and managemet

This study represent case study with object research of local government of Palembang the purpose of this is to find out the empirics proof differences financial performance in decentralization, effectiveness, efficiency and perfection between before and after Application Performance Based Budgeting

The hypothesis tested with parametric different test, The test is wicoxon sign rank test. The result test showed that there is no significant difference to the financial performance in the government of palembang that are seen from the financial aspect, fiscal decentralization, effectiveness efficiency and perfection ratio between before and after Application Performance Based Budgeting

Key words : Performance Based Budgeting, financial performance,
The Government of Palembang

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1	Uji Normalitas Data	105
Lamp 2	Uji peringkat Bertanda (wilcoxon sign rank test).....	109
Lamp 3	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / Otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi sektor publik tersebut tidak sekedar perubahan format lembaga akan tetapi menyangkut pembaharuan alat - alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan cita cita reformas

Adanya tuntutan demokratisasi yang kemudian menjadi fenomena global. konsekuensi dari adanya fenomena tersebut yang mengedepankan pentingnya

aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik termasuk bidang pengelolaan keuangan dan pada akhirnya penganggaran berbasis kinerja yang merupakan metode yang dipilih pemerintah pusat untuk menjawab tuntutan tersebut. Pada tahun 1999 pemerintah pusat memberlakukan UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. kedua undang Undang tersebut beserta beberapa peraturan pemerintah PP 104 sampai dengan 110 tahun 2000 dan keputusan menteri dalam negeri yang mendukungnya yaitu kepmendagri No 29 tahun 2002 telah merubah secara drastis sistem penganggaran dan pengelolaan pemerintah daerah. Peraturan perundangan baru tersebut mensyaratkan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran kinerja setiap tahunnya

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut diatas didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna

anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah . Untuk itu penulis memilih judul “ **Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah** “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kemandirian, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat rasio keserasian, dan tingkat efisiensi dan efektivitas PAD pada Pemerintah kota Palembang antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja?
2. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kemandirian, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat rasio keserasian, tingkat kemampuan keuangan daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas PAD sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah kota Palembang antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah kota Palembang antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja
3. Untuk mengetahui tingkat rasio keserasian pada pemerintah kota Palembang sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat efisiensi PAD Pemerintah Daerah kota Palembang antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja
5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat efektifitas PAD Pemerintah kota Palembang antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah kota Palembang antara sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja.

2. Bagi Pemerintah kota Palembang

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah kota Palembang sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Rancangan Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian dengan obyek tertentu yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian analisis diskriptif Kuantitatif yang mencoba untuk menggambarkan obyek-obyek

serta fakta-fakta yang terdapat di lapangan penelitian dengan jalan melakukan perbandingan antara obyek-obyek penelitian yang kemudian dari hasil-hasilnya didiskripsikan ke dalam suatu bentuk penjabaran

1.5.2 . Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah kota Palembang yang berlokasi pada Sekretariat Daerah kota Palembang dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah: Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Badan Pusat Statistik (BPS) pemerintah kota Palembang..

Objek dari penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah kota Palembang . Dalam hal ini adalah anggaran penerimaan baik yang berasal dari PAD, maupun yang berasal dari luar daerah seperti sumbangan atau pinjaman dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

1.5.3 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, operasional variabel sebagai berikut:

1. APBD, yaitu rencana kerja atau program kerja pemerintah untuk tahun kerja tertentu yang didalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.
2. PAD, merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah. Pos penerimaan pajak berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengolahan sumber daya alam.

3. Penerimaan daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah kota Palembang periode 1 tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
4. Pengeluaran / belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah yang ada dalam APBD.
5. Pengeluaran / Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan bagi daerah yang ada dalam APBD.
6. Bantuan / Pinjaman pemerintah pusat atau provinsi adalah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk melaksanakan kegiatan operasi atau program pembangunan

1.5.4 Batasan Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah kota dapat dilihat dari segi finansial dan non finansial. Dalam penelitian ini yang dianalisis hanya didasarkan pada segi finansialnya saja dengan menggunakan rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menggunakan periode anggaran tahun 1999, 2000, 2001 yang merupakan periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja dan anggaran tahun 2004, 2005, dan 2006 yang merupakan periode setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja



1.5.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif berupa keadaan dan gambaran umum pemerintah kota Palembang merupakan profil daerah.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan perhitungan APBD pemerintah kota Palembang periode anggaran 1999, 2000, 2001, 2004 2005 dan 2006 Adapun alasan pemilihan periode data laporan keuangan tersebut yaitu periode anggaran 1999, 2000, dan 2001 merupakan periode sebelum diberlakukannya anggaran berbasis kinerja. Sedangkan periode anggaran 2004, 2005 dan 2006 merupakan periode setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja..

1.5.6 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang berupa dokumen-dokumen pemerintah kota Palembang yang terdiri dari:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang terdiri dari:

- a) Data yang berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di pemerintah kota Palembang.

Data tersebut berupa:

1. Laporan perhitungan APBD periode 1999, 2000, 2001, , 2004, 2005 dan 2006
2. Laporan pertanggungjawaban walikota Palembang
3. Arah dan Kebijakan Umum APBD kota Palembang tahun anggaran 2006.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data disusun oleh entitas selain dari pemerintah kota Palembang yang sudah diolah. Data tersebut bersumber dari buku-buku teori / jurnal akuntansi dan peraturan-peraturan pemerintah. Data-data tersebut akan diperoleh dari bagian keuangan daerah pemerintah kota Palembang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Palembang

1.5.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Dokumentasi.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer dengan cara mencari data yang telah ada di bagian keuangan pemerintah kota Palembang Dispenda dan Bappeda kota Palembang

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang ada baik berupa buku maupun karya ilmiah yang digunakan sebagai pedoman ataupun landasan teori

dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.8 Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data pada penelitian ini penulis membuat tahap-tahap teknik analisis yaitu:

1. Analisis Kuantitatif

Dilakukan dengan melakukan analisis semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan dan melakukan uji statistik terhadap data data tersebut

A. Penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan, yaitu terdiri dari:

1) Rasio kemandirian

Ukuran ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Erlangga Agustino Landiyanto (2005) yang dikutip dari halim (2001)

a. Rasio PAD terhadap pengeluaran daerah

Untuk periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio PAD terhadap pengeluaran rutin

untuk periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Pengeluaran rutin}} \times 100\%$$

untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Penerimaan yang berasal dari daerah terhadap pengeluaran daerah

untuk periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{PAD} + \text{BHPBP}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{PAD} + \text{BHPBP}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2) Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Menurut Erlangga Agustino Landiyanto (2005) yang mengutip dari Musgrave dan Musgrave (1991)

a. Rasio PAD terhadap penerimaan daerah

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap penerimaan daerah

$$= \frac{\text{BHPBP}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio sumbangan dari pusat terhadap penerimaan daerah

Untuk periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{Sumbangan dari Pusat}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

$$\frac{\text{DAU + DAK + Perimbangan dari propinsi + lain lain pendapatan yang sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Keserasian

Rasio belanja rutin dapat diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan. Sedangkan untuk rasio belanja pembangunan dapat di peroleh dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD tahun yang bersangkutan

Untuk periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja

a. Rasio Belanja Rutin

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Pembangunan

Untuk periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja

$$\frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{total Belanja}} \times 100\%$$

4) Rasio Efektivitas dan efisiensi

Rasio efektivitas

Tingkat efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan relisasi

$$= \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Jika biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD tidak dicantumkan dalam APBD maka biaya tersebut ditetapkan sebesar 5% perbulannya dari pemungutan pajak dan retribusi daerah atau dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{(\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times (5\% \times 12\text{bulan})}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

B. Pengujian normalitas data

Pengujian normalitas data dengan menggunakan tehnik pengujian *Kolmogorov Smirnov*. Uji normalitas data tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kenormalan suatu data. Dengan mengetahui kenormalan suatu data maka akan dapat diketahui alat statistik apa yang sebaiknya yang digunakan. Apakah menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik yang akan digunakan sebagai alat uji untuk hipotesa. Adapun pedoman pengambilan keputusan kenormalan distribusi adalah

- a. Jika signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi tidak normal
- b. Jika signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi normal

C. Jika data yang diuji tersebut berdistribusi normal maka pengujian hipotesa menggunakan alat uji statistik parametrik yaitu uji t berpasangan (*paired sample t test*) sedangkan jika data yang diuji tersebut memiliki distribusi yang tidak normal maka pengujian hipotesa menggunakan alat uji statistik non parametrik yaitu uji peringkat bertanda wilcoxon (*wilcoxon signed ranks test*)

D. Pengambilan keputusan berdasarkan angka Z

- 1) Jika Statistik hitung (angka Z output > Statistik tabel) maka H_0 ditolak

- 2) Jika Statistik hitung (angka Z output < Statistik tabel) maka H_0 diterima

E. Analisis

Melakukan analisis atas hasil uji t berpasangan atau uji peringkat bertanda wilcoxon, termasuk menganalisis keputusan yang bisa diambil berdasarkan hasil uji parametrik atau non parametrik

2. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis angka angka hasil perhitungan tersebut dengan menggunakan teori teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam analisis kualitatif. Serta digunakan untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan terjadi atau tidak terjadinya perubahan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Palembang pada periode sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima Bab yang akan menguraikan secara garis besar masing masing bahasan dan akan dirinci lagi menjadi sub-bab sub-bab sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di jelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta teknik analisis yang di gunakan dalam menghitung dan mengukur kemampuan keuangan Kota Palembang periode 2001 sampai dengan 2006

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep analisis rasio keuangan, konsep dasar anggaran sektor publik (APBD), proses penyesuaian dan penetapannya, struktur APBD, komponen-komponen yang terdapat dalam APBD tersebut yang meliputi klasifikasi pendapatan dan belanja, serta pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG

Pada bab ini dikemukakan secara singkat kondisi geografis Kota Palembang dan keadaan struktur organisasi serta tata pemerintahan daerah tersebut.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan analisis dan pembahasan secara terstruktur mengenai kinerja keuangan Kota Palembang pada periode 2001 sampai dengan periode 2006 guna melihat kemampuan daerah tersebut pada masa sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil analisis APBD kota tersebut dan apa saran yang dapat diberikan sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah kota yang bersangkutan dalam hal kemampuan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2006, Sumatera Selatan Dalam Angka 2004, Palembang : BPS.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*. Yogyakarta : BPFE.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar)*. Jakarta : Erlangga.
- Deputi IV BPKP . 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (revisi)*. (online), diakses 21 Februari 2007.
- Halim, Abdul., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi Jakarta* : Penerbit Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo,1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT Aksara Pratama. Yogyakarta 2003
- Mahsun, M., 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*, Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Mahsun, M, dkk., 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, yogyakarta :Penerbit BPFE.
- Mardiasmo., 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Yogyakarta :Penerbit Andi.
- Muhidin, Sambas Ali Dan Somantri Ating, 2006, *Aplikasi Statistik Dalam Penelitian*, Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.
- Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Palembang, Pemerintah Kota . 2007. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1999 : 2000*. Palembang : Bagian Keuangan.
- Palembang, Pemerintah Kota . 2007. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000*. Palembang : Bagian Keuangan.

Palembang, Pemerintah Kota . 2007. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2001*. Palembang : Bagian Keuangan.

Palembang, Pemerintah Kota . 2007. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2004*. Palembang : Bagian Keuangan.

Palembang, Pemerintah Kota . 2007. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005*. Palembang : Bagian Keuangan.

Palembang, Pemerintah Kota . 2007. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006*. Palembang : Bagian Keuangan.

Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.

_____ .Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 *Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah*.

_____ .Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

_____ Undang Undang No. 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

_____ Undang Undang No. 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2002 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2006 *Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun 2007*.